
IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA WIDOROPAYUNG KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO

Ayu Sintia Ningsih¹⁾, Nina Sa'idah Fitriyah²⁾, Dini Noor Aini³⁾.

¹Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, FISIP Administrasi Publik, Situbondo

²Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, FISIP Administrasi Publik, Situbondo

³Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, FISIP Administrasi Publik, Situbondo

Email: ayusintia2303@gmail.com

ABSTRAK

PAMSIMAS merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meningkatkan akses air bersih, melalui pembangunan sistem air minum yang terjangkau dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup penduduk serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan dan kesehatan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi (PAMSIMAS) di Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo serta faktor pendukung dan penghambat implementasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan informan penelitian yaitu, ketua KPSPAMS, kepala desa, penanggung jawab SPAM DPUPR, koordinator KKM, dan penerima manfaat PAMSIMAS. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data menurut Miles yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) implementasi program Pamsimas di Desa Widoropayung berjalan dengan baik meskipun belum optimal dibagian SDM. 2) Sosialisasi program sudah efektif menjangkau masyarakat. 3) Sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan sudah mencukupi. 4) Struktur birokrasi sudah baik, pembagian tugas dan kewenangan antar instansi disesuaikan dengan bidang yang ditangani oleh instansi masing-masing. Ada faktor pendukung dan penghambat pada implementasi program PAMSIMAS. Faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari pihak dinas yang turut memberikan solusi jika ada kendala dan pihak masyarakat yang memberikan dukungan dalam bentuk tenaga maupun dana kontribusi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu sebagian masyarakat tidak setuju karena harus membayar biaya pemasangan awal penyaluran air kerumah warga dan faktor kondisi yang tidak mendukung untuk pengaliran air Pamsimas sehingga hanya bisa disalurkan ke satu dusun saja.

Kata kunci: Implementasi Program, PAMSIMAS.

ABSTRACT

The Community-Based Drinking Water and Sanitation Program (PAMSIMAS) is an initiative by the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) designed to enhance access to clean water through the establishment of cost-effective and sustainable water supply systems. The program seeks to improve residents' quality of life while fostering awareness about hygiene and health at the community level. This study examines the implementation of the PAMSIMAS program in Widoropayung Village, Besuki District, Situbondo Regency, focusing on the factors that facilitate and hinder its execution.

This study employs a qualitative descriptive research method, utilizing key informants such as the chairman of KPSPAMS, the village head, the SPAM DPUPR officer, the KKM coordinator, and beneficiaries of the PAMSIMAS program. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and documentation. The analysis follows Miles' data analysis framework, which includes data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing.

The research results show that: 1) the implementation of the Pamsimas program in Widoropayung Village is running well, although it is not yet optimal in the human resources aspect. 2) The program's socialization has effectively reached the community. 3) Human resources, budget resources, and equipment resources are sufficient. 4) The bureaucratic structure is good, with the division of tasks and authorities among agencies adjusted according to the fields handled by each agency. There are supporting and inhibiting factors in the implementation of the PAMSIMAS program. The supporting factors include the support from the relevant departments that provide solutions when there are obstacles and the community's support in the form of labor and financial contributions. Meanwhile, the inhibiting factors are that some members of the community do not agree because they have to pay the initial installation cost for water distribution to households, and the unfavorable conditions for the PAMSIMAS water distribution, which means it can only be supplied to one hamlet.

Keywords: Program Implementation, PAMSIMAS

PENDAHULUAN

Sektor air minum dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, khususnya di pedesaan dan daerah pinggiran kota (peri urban) berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang baik akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air minum dan sanitasi yang baik. Ketiga dampak tersebut akan memberikan dampak lanjutan berupa peningkatan produktivitas masyarakat. PDAM sebagai Perusahaan Daerah Air Minum yang memberikan jasa pelayanan untuk mencukupi kebutuhan air bersih yang layak konsumsi belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, bahkan masyarakat cenderung lebih memilih mengeluarkan uang ekstra untuk membeli AMDK (Air Minum Dalam Kemasan). Hal ini kemudian menjadi masalah bagi masyarakat miskin, dimana mereka sulit memenuhi kebutuhan air minum yang berkualitas karena dipengaruhi keadaan ekonomi.

Permasalahan air bersih dan sanitasi masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi mencapai puncaknya dengan diperkenalkannya Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang melibatkan berbagai *stakeholder* baik yang berada di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Program berbasis masyarakat ini merupakan dukungan dari Bank Dunia dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan antara lain Bappenas, Departemen Pekerja Umum, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan. Sesuai dengan prinsipnya yang berbasis masyarakat maka peran serta aktif masyarakat itu sendiri yang menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut.

PAMSIMAS adalah suatu program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan. PAMSIMAS dapat berjalan efektif dan berkelanjutan apabila berbasis pada masyarakat dengan melibatkan seluruh masyarakat baik perempuan dan laki-laki, baik yang kaya dan yang miskin dan dilakukan melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Proyek tanggap terhadap kebutuhan masyarakat tersebut diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoprasionalkan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan. Program PAMSIMAS adalah program berbasis masyarakat, dan pemanfaatan dari penyediaan air. PAMSIMAS sangatlah tergantung pada perilaku masyarakat sebagai penerima manfaat. Demikian sebaliknya, pilihan penggunaan air juga akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kehidupan keseharian.

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) telah menjadi salah satu program andalan nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk pedesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program PAMSIMAS I yang dimulai pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 dan PAMSIMAS II dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin pedesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 12.000

desa yang tersebar di 233 kabupaten/kota. Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi dan target SDGs, Program PAMSIMAS dilanjutkan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 khusus untuk desa-desa. Pada tahun 2022 Pamsimas dilanjutkan pelaksanaannya sebagai kegiatan untuk mendukung capaian air minum layak dan aman untuk seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMN 2020 - 2024.

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis pemberian bantuan keuangan khusus pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Kabupaten Situbondo tahun 2018 bahwa “Dalam meningkatkan akses air minum yang aman dan akses sanitasi yang layak sebagai kebutuhan dasar masyarakat melalui Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III) yang dibiayai dari APBN dan APBD dalam bentuk bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa”. Untuk mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknik, dan pengembangan kapasitas. Program Pamsimas juga mengajak masyarakat desa untuk terlibat dalam menjalankan program, agar masyarakat mandiri dalam pengelolaan operasional, dan juga pemeliharaan sarana yang dibangun. Pelaksanaan Program Pamsimas berbasis masyarakat artinya masyarakat dituntut untuk berperan penting dalam pelaksanaan dan pengelola yang dibentuk dari masyarakat serta instansi pemerintahan baik di tingkat desa maupun daerah harus bisa saling bekerjasama, sehingga dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan transparansi akan setiap kegiatan serta pertanggung jawaban dari pengelola harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Salah satu desa penerima program ini adalah Desa Widoropayung, Kabupaten Situbondo. Desa Widoropayung merupakan salah satu desa di Kabupaten Situbondo yang masih menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terkait air minum dan sanitasi. PAMSIMAS menjadi solusi pilihan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan program. Masih ada masyarakat yang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan air di sungai, seperti mandi, membuang air besar/kecil, mencuci baju, mencuci piring. Aktivitas ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh warga Desa Widoropayung tentu adalah kebiasaan yang tidak baik ataupun tidak sehat. Karena dengan aktivitas tersebut maka dapat menimbulkan beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh air dan lingkungan kotor seperti diare, dan bukan hanya itu saja lingkungan sekitarnya tentu akan menjadi tidak bersih dan tidak sehat atas aktivitas ataupun kebiasaan masyarakat yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Melihat pada permasalahan yang terjadi di Desa Widoropayung peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teori Program Edward III dengan judul “Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo”

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Administrasi publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi berasal dari bahasa Latin *Ad* dan *Ministrare* yang berarti membantu, melayani dan memenuhi. Administrasi dalam arti sempit adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik- mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan administrasi dalam arti luas merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Menurut Silalahi (dalam Zulkifli, 2014:14) yang menjelaskan bahwa administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja yang sebagaimana telah ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Program Publik

Program publik itu adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Setiap Program publik tentunya mempunyai proses formulasi dan evaluasi yang mengikutinya. Eksekusinya berada pada level implementasi Program. Semua proses Program publik saling mempengaruhi satu sama lainnya, tidak bisa saling melemahkan, tetapi sebaliknya harus saling menguatkan, sehingga Program berjalan secara baik dan optimal. Sadhana (2011:47) mengutip pendapatnya John Dewey mengungkapkan bahwa ada dua cara untuk mengukur Program publik, yaitu dengan cara bagaimana rencana-rencana tindakan harus dipilih dari alternatif- alternatif dan bagaimana mengamati akibat-akibat yang dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat. Apa yang dikatakan oleh John Dewey adalah sebuah eksperimen terhadap bentuk kebijakn publik. Bahwa Program publik itu dapat dilihat dari alternatif yang diambil dalam Program. Dalam Program publik ada banyak pilihan alternatif, sehingga pilihan Program itu adalah Program yang paling baik diantara alternatif-alternatif yang lain. Atau pilihan yang paling baik diantara yang baik.

Di samping itu, John Dewey juga mengukur Program dengan eksperimen terhadap keberhasilan Program. Dampak yang ditimbulkan dari uji coba tersebut dijadikan sebagai barometer keberhasilan Program. Ketepatan, kebaikan, keberhasilan dari uji coba akan menjadi indikator Program itu berhasil atau tidak. Berbagai eksperimen dapat dilakukan serta dengan berbagai cara dan metode dapat pula diparaktikan. Setiap Program tidak serta merta langsung diputuskan. Program publik membutuhkan pengujian, penelitian, eksperimen dan pengulangan tahapan-tahapan Program, sehingga kelemahan dan kekurangan dari Program dapat diminimalisir sekecil mungkin. Pengujian terhadap dampak Program juga menjadi indikator dari keberhasilan Program publik, yang mempunyai dampak positif yang dijadikan sebagai pilihan Program. Aspek kemudharatan dan kemanfaatan Program harus di kedepankan sebagai konsekuensi dari Program yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Program publik tidak boleh asal diputuskan apa pun kondisi dan situasinya, karena setiap Program mempunyai dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Dalam kemajuan sistem pemerintahan yang semakin maju saat ini kita tidak lepas dengan Program publik. Program-Program publik yang kita temui di berbagai bidang seperti

bidang pemerintahan, kesejahteraan, sosial, kesehatan, keamanan, pertanian, perekonomian, pendidikan, perizinan dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi untuk mencapai tujuan bersama.

Implementasi Program

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastiar merupakan pelaksanaan Program dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output Program dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan Program yang bersangkutan. Implementasi Program publik adalah sesuatu yang kompleks dan melibatkan berbagai bentuk kegiatan, berbagai aktor atau pihak yang terkait dengan lingkungan atau konteks dimana Program itu hendak diterapkan untuk mencapai tujuannya. Ada beberapa model implementasi Program, akan tetapi peneliti tertarik menggunakan Model Implementasi Program Pamsimas di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo melalui empat variabel keberhasilan implementasi menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga untuk mencapai kinerja implementasi Program perlu diinternalisasikan dengan sinergi dan intensif. Alasan peneliti menggunakan model Edward III, karena dari beberapa permasalahan yang telah dijelaskan di latar belakang, masalah tersebut sesuai dengan variabel tahapan implementasi Program menurut Edward III dan Program Pamsimas merupakan suatu program yang bersifat *top-down* (pendekatan atas ke bawah) serta model Edward III juga termasuk dalam implementasi Program *top-down*, maka keduanya saling berhubungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian yaitu Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014), yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi. Sebagai informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah

- 1) Sualis sebagai kepala desa Widoropayung,
- 2) Fitriyatul Rian H sebagai ketua KPSPAMS,
- 3) Rinda A sebagai penanggung jawab SPAM pegawai bidang cipta karya,
- 4) Ali Sadikin sebagai Koordinator KKM,
- 5) Masyarakat yang mewakili dalam hal ini ditetapkan 5 orang yaitu Nila Yuliar, Jamila, Solehati, Muslimah, dan Zainiyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program PAMSIMAS ini memiliki tujuan yaitu untuk mencapai target akses aman air minum dan sanitasi 2019, yaitu jumlah masyarakat berpenghasilan rendah terhadap akses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, serta

meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target aman air minum dan sanitasi melalui pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. PAMSIMAS memiliki perbedaan dengan Program yang lain karena pada Program ini menitik beratkan terhadap pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat dilibatkan dari mulai perencanaan, implementasi sampai tahap evaluasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Program ini merupakan Program yang berbasis masyarakat dimana masyarakat dilibatkan disemua aspek dengan fokus pemberdayaan untuk memberikan akses air minum dan sanitasi berbasis Masyarakat.

Desa Widoropayung merupakan salah satu desa yang mendapat bantuan Program Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Program Pamsimas diwujudkan dengan pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih seperti sumur (bor), menara air, kran umum, jaringan perpipaan ke rumah-rumah warga, serta sarana cuci tangan di Sekolah. Dari Program Pamsimas ini sudah ada beberapa sarana penyediaan air minum dan sanitasi yang sudah terbangun diantaranya adalah menara air dan kran umum. Saat ini ada 1 bangunan menara air yang berfungsi untuk mengalirkan air bersih ke rumah-rumah warga dan 1 kran umum yang digunakan oleh masyarakat. Di Desa Widoropayung air dari Menara/tandon Pamsimas dialirkan ke rumah rumah warga dengan sistem pompa listrik yang saat ini melayani 485 sambungan rumah. Bagi warga yang ingin memasang kran air sendiri di rumah, dikenakan biaya untuk pemasangan pipa dan meteran. Setelah pemasangan kran, warga diwajibkan membayar iuran setiap bulan berdasarkan banyaknya air yang mereka gunakan dari kran Pamsimas.

Program Pamsimas dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat di wilayah desa sasaran melalui tahapan kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Secara garis besar tahapan yang dilaksanakan dalam implementasi program Pamsimas di Desa Widoropayung adalah sebagai berikut:

a) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan di tingkat kabupaten dan desa/kelurahan. Dalam kegiatan sosialisasi masyarakat diberi informasi mengenai latar belakang dan tujuan program serta peran dan tanggung jawab yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, pengelolaan dan pemeliharaan sistem sarana yang dibangun.

Dalam proses sosialisasi program Pamsimas Pemerintah Desa Widoropayung menggunakan berbagai media untuk menyosialisasikan program Pamsimas kepada warga. Secara umum tujuan dari penggunaan media sosialisasi tersebut adalah untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan implementasi mulai dari kegiatan pengawasan/pemantauan, kegiatan pembangunan sarana sampai dengan pembentukan badan pengelolanya. Media tersebut diantaranya adalah: Poster dan Spanduk, Stiker.

b) Pengajuan Proposal Kegiatan dan Pemilihan Desa

Setelah dilakukan sosialisasi di tingkat kabupaten dan desa, tahap selanjutnya adalah pengajuan proposal kegiatan. Sebelum melakukan pengajuan proposal, pemerintah desa harus melakukan musyawarah dulu dengan warganya apakah akan ikut program Pamsimas atau tidak. Setelah mendapatkan persetujuan warga, kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Minat Keikutsertaan Pamsimas (SPMKP) yang ditandatangani oleh kepala desa, perwakilan masyarakat, dan diketahui oleh camat.

Berdasarkan Surat Pernyataan Minat Keikutsertaan Pamsimas (SPMKP) dari desa/kelurahan, TKK (Tim Koordinasi Kabupaten) kemudian melakukan pemilihan

desa yang akan mendapat bantuan program Pamsimas dengan mempertimbangkan prioritas desa/kelurahan dari hasil ranking dan pengelompokan wilayah dimana jumlahnya disesuaikan dengan target desa dalam satu tahun anggaran. Daftar desa yang ditetapkan untuk ikut serta dalam proyek Pamsimas dilampirkan dalam Surat Keputusan Penetapan Desa yang kemudian dikirimkan kepada desa/kelurahan yang bersangkutan. Dari pihak pemerintah desa kemudian diumumkan ke masyarakat melalui pertemuan langsung atau ditempel melalui papan pengumuman kantor desa.

c) Perencanaan dan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)

Setelah desa/kelurahan diumumkan sebagai penerima program dan ditetapkan dengan Surat Keputusan dari TKK, maka masyarakat dapat memulai pelaksanaan proyek Pamsimas yang diawali dengan proses perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat. Proses ini difasilitasi oleh Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) yang ditunjuk oleh Kepala Desa. Penyusunan RKM dilakukan dengan cara musyawarah antara Kepala Desa, Aparat Desa, BPD, tokoh masyarakat, serta berkoordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo untuk membahas kemungkinan adanya hambatan di masyarakat. Setelah RKM selesai disusun kemudian diajukan kepada DPUPR sebagai wakil program Pamsimas untuk diverifikasi dan disahkan melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

d) Pelaksanaan Konstruksi Sarana Air Minum Di Masyarakat dan Sekolah

Sebelum melakukan konstruksi sarana air minum, masyarakat melalui musyawarah menentukan jenis sarana air yang ingin dibangun dengan mempertimbangkan topografi wilayah, ketersediaan sumber air, biaya konstruksi, ketersediaan lahan dan biaya perawatan. Pembangunan konstruksi sarana oleh masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan kontribusi sumberdaya yang ada di masyarakat baik dalam bentuk uang tunai, tenaga kerja, material lokal, dan sebagainya.

Di Desa Widoropayung proses pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi sarana air dilakukan dengan cara gotong royong, kecuali dalam kegiatan pengeboran sumber air. Proses pengeboran sumber air dilakukan dengan menggunakan tenaga ahli karena memerlukan keahlian dan peralatan khusus yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, sehingga dalam kegiatan pembangunan sarana masyarakat hanya membantu pada tahap pemasangan pipa dan pembangunan menara air.

e) Pengelolaan Sarana Air Minum, Sanitasi dan Program Kesehatan Oleh Masyarakat

Dalam kegiatan pengelolaan sarana, dibentuk Kelompok Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS). KPSPAMS dibentuk atas dasar kesepakatan masyarakat yang difasilitasi oleh Fasilitator Masyarakat, KKM dan Pemerintah Kelurahan yang anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat. KPSPAMS bertugas untuk mengoperasikan dan memelihara sarana air minum dan sanitasi yang terbangun sehingga memberikan pelayanan yang berkelanjutan pada masyarakat penerima manfaat. KPSPAMS juga bertanggungjawab untuk mengembangkan tata kelola dan aturan, termasuk menetapkan iuran yang menjamin keberlanjutan layanan, pengembangan pelayanan, dan kegiatan pelestarian sumber daya air dan lingkungan.

Selain melakukan pengelolaan untuk menjaga keberlanjutan program, kelompok Pengelola juga berperan untuk mengorganisir kegiatan peningkatan praktek hidup bersih dan sehat di masyarakat dengan cara melakukan promosi kesehatan. Promosi kesehatan dilakukan oleh badan pengelola bekerjasama dengan organisasi di masyarakat seperti Posyandu, PKK dengan cara melakukan penyuluhan, pendekatan

dan ajakan untuk memperbaiki perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga.

1) Komunikasi

Komunikasi Program memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). a) Dimensi transmisi menghendaki agar Program publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) Program tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran Program dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam implementasi Program Pamsimas, Pemerintah Desa Widoropayung mensosialisasikan program ini kepada warga dengan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk melakukan komunikasi terkait program Pamsimas. Pertemuan umum dilakukan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat setempat serta kelompok-kelompok organisasi yang ada di desa seperti posyandu, RT, RW, dan lain-lain. b) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar Program yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari Program publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan Program tersebut secara efektif dan efisien. Dari pihak desa Widoropayung sudah memberikan penjelasan mengenai PAMSIMAS di setiap diadakannya sosialisasi. c) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar Program yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana Program, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Konsistensi para petugas pelaksana dalam memberikan informasi sudah baik. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan selalu diadakan sosialisasi terlebih dahulu, sehingga semua komponen masyarakat paham akan tata cara pelaksanaan. Berdasarkan semua wawancara dapat disimpulkan bahwa komunikasi di tingkat desa dilakukan dengan diadakan sosialisasi dengan masyarakat juga rapat antar anggota KKM dan KPSPAMS. Juga berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, peneliti melihat adanya komunikasi tidak hanya melalui pertemuan tetapi juga dilakukan melalui alat komunikasi telepon seluler yakni komunikasi telepon dan WhatsApp antara pelaksana baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan unsur penting dalam kesuksesan suatu implementasi Program sumber daya ini meliputi a) sumber daya manusia, Pelaksanaan PAMSIMAS melibatkan banyak sumber daya manusia baik di tingkat pusat, ditingkat daerah maupun ditingkat desa. Sumberdaya manusia tidak hanya harus tercukupi dari segi jumlah akan tetapi juga harus memiliki kualitas. Sumber daya di tingkat Kabupaten Situbondo ikut mempengaruhi keberhasilan Program PAMSIMAS. Ditingkat Desa Widoropayung sendiri membutuhkan SDM untuk keberhasilan Program PAMSIMAS karena di Desa Widoropayung sebagai inti pelaksanaan dari Program ini. Kualitas SDM ditingkat desa akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan PAMSIMAS. b) sumber daya keuangan juga merupakan elemen penting karena akan mempengaruhi keefektifan program, besar kecilnya anggaran juga mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Sumber anggaran PAMSIMAS di Kabupaten Situbondo berasal dari APBN/APBD, APBDDes dan dana kontribusi masyarakat. c) sumber daya peralatan, Pelaksanaan PAMSIMAS yang dilaksanakan masyarakat membutuhkan peralatan-peralatan yang berguna untuk mendukung berjalannya program. Tanpa adanya peralatan suatu program tidak akan bisa berjalan secara baik. sumber peralatan

pada Program PAMSIMAS di Desa Widoropayung yang dibeli dengan anggaran seperti pompa air, semen, bata, pipa saluran, panel listrik, dan lainnya. Selain itu ada peralatan yang disewa seperti truk mixer untuk mengecor. Juga ada peralatan yang dibawa oleh masyarakat.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana Program adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau Program publik. Jika pelaksanaan suatu Program ingin efektif, maka para pelaksana Program tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. sikap pelaksanaan dalam implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) sudah baik. Para pelaksana PAMSIMAS seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan, Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kepala Desa, KKM, KPSPAMS, dan juga masyarakat yang ikut membantu melaksanakan pembangunan Pamsimas dengan baik.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Struktur organisasi menggambarkan tentang tugas dan kewenangan dari setiap implementator program. Dengan adanya struktur organisasi, posisi dan pekerjaan tiap pegawai menjadi jelas, sehingga mereka tau apa yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya. Para pelaksana Pamsimas memiliki peran dan tanggung jawab masing masing dari tingkat kabupaten maupun tingkat desa. KKM dan KPSPAMS memiliki peran yang berbeda tetapi saling bekerja sama dalam pelaksanaan program Pamsimas. mengenai tugas pelaksana di tingkat desa yaitu KKM sebagai penerima Program PAMSIMAS yang berhubungan dengan administratif dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, untuk pelaksanaan dilapangan KKM membentuk Kelompok Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Program Pamsimas harus terorganisir sehingga tujuan program dapat dicapai secara optimal. Hal ini yang menjadikan dasar bahwa program Pamsimas secara khusus mendorong terbentuknya kelembagaan keswadayaan masyarakat (KKM) yang dapat dijadikan sebagai wadah partisipatif bagi masyarakat di tingkat desa yang dilandasi dengan nilai dan norma yang berlaku. Untuk menjamin pelayanan yang dihasilkan melalui program Pamsimas dapat berkelanjutan, maka kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi terbangun harus terorganisasi dengan baik dan ditunjang dengan tertib administrasi. Pengelolaan tersebut dilakukan oleh suatu organisasi yang mewakili masyarakat yang disebut dengan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS).

5) Faktor Pendukung PAMSIMAS

Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo dan beberapa dinas lain yang tergabung dalam pokja AMPL secara berkala memberikan dukungan baik moril dan materil. Selain itu pihak masyarakat setempat memberikan dukungan karena didesa Widoropayung disaat musim kemarau ada sebagian sumur dan sungai yang kering atau surut sehingga lumayan kesusahan untuk mendapatkan air bersih. Kontribusi masyarakat merupakan hal penting dari program ini karena diperlukannya dana kontribusi dari masyarakat dan bantuan tenaga untuk pembangunan tandon air.

6) Faktor Penghambat PAMSIMAS

Program PAMSIMAS yang sedang berjalan ini tidak selalu berjalan mulus karena menghadapi sebagian masyarakat yang menolak karena adanya biaya awal pemasangan yang lumayan mahal membuat sebagian masyarakat dengan ekonomi menengah menolak program ini. Selain itu disaat penyaluran air menggunakan pipa sering mengalami kendala. Penyaluran PAMSIMAS juga tidak bisa disalurkan pada seluruh dusun di desa Widoropayung hanya dusun Sekolah saja yang menerima penyalurannya.

KESIMPULAN

Bedasarkan penelitian implemetasi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) yang telah dilakukan di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi program Pamsimas sebagai wujud upaya pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak sudah mampu memberikan kontribusi yang positif pada masyarakat penerima program. Program Pamsimas sudah berhasil dilaksanakan di Desa Widoropayung, tetapi dalam prosesnya masih mengalami kendala sehingga masih diperlukan perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaannya. Implemetasi Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) dapat dilihat dari empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sehingga dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Komunikasi.
Kegiatan komunikasi terkait sosialisasi program Pamsimas telah menjangkau semua kalangan masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan secara langsung melalui pertemuan umum dengan masyarakat serta menggunakan beberapa media untuk menyampaikan informasi/pesan yang berbentuk poster, spanduk dan stiker.
 - b. Sumber Daya.
Sumber daya yang mendukung dalam implementasi Program ini mencakup yaitu:
 - 1) sumber daya manusia di tingkat kabupaten maupun tingkat desa jumlah pegawai sudah mencukupi. Meski jumlahnya sudah mencukupi, kinerja badan pengelola sarana masih belum optimal karena tidak adanya pelatihan untuk para pelaksana program.
 - 2) sumber daya anggaran di Desa Widoropayung sudah mencukupi sejumlah Rp 415.000.000 yang berasal dari APBN/APBD, APBDes, dan dana kontribusi masyarakat.
 - 3) sumber daya peralatan telah memenuhi untuk mendukung keberlanjutan program Pamsimas di desa Widoropayung.
 - c. Disposisi.
Disposisi atau sikap dari pelaksana program adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau Program publik. Sikap pelaksanaan dalam implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) sudah baik.
 - d. Struktur birokrasi.
Dengan adanya struktur organisasi, posisi dan pekerjaan tiap pegawai menjadi jelas, sehingga mereka tau apa yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya. untuk pelaksanaan Pamsimas KKM membentuk kelompok pengelola sarana air

- minum dan sanitasi (KPSPAMS).
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Impelementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
 - a. Faktor Pendukung Implementasi program PAMSIMAS tidak lepas dari beberapa faktor sehingga implementasinya berjalan baik. Faktor pendukung tersebut yaitu:
 - 1) komitmen pelaksana dari tingkat kabupaten dan tim pendamping yang selalu membimbing disaat ada kendala Pamsimas,
 - 2) antusiasme masyarakat dalam pembangunan Pamsimas yang ikut menyumbangkan tenaga juga dana kontribusi.
 - b. Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi program PAMSIMAS di Desa Widoropayung yaitu:
 - 1) adanya penolakan sebagian masyarakat karena biaya awal pemasangan,
 - 2) jalur pipa dijalan raya yang sulit dilewati sehingga harus melakukan penggalian terowongan untuk menanam pipa,
 - 3) dan penyaluran PAMSIMAS hanya bisa disalurkan di satu dusun yang terdekat dengan tandon air.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H, M.H, Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Nina Sa'idah Fitriyah, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dini Noor Aini, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Civitas Akademik dan Tenaga Kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Situbondo sebagai lembaga pemerintah yang sudah bersedia menerima peneliti melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah.
8. Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa Widoropayung yang mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.

REFERENSI

Buku:

Arif Zulkifli. 2014, *Dasar dasar Ilmu Lingkungan*, Jakarta: Salemba Teknika.

Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London England.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3 Edition)*. New York: SAGE Publications, Inc.

Sadhana, K. (2011). *Realitas Program Publik*. Universitas Negeri Malang (UM Press).

Jurnal :

Fitriyah, N.S. (2019). Evaluasi Program Pamsimas Di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ilmiah Action Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*,14(2), 44-54.

Dokumen Lain :

Pedoman Umum PAMSIMAS Tahun 2022.

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis pemberian bantuan keuangan khusus pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Kabupaten Situbondo tahun 2018.